



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

### KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 210 TAHUN 1986

### TENTANG

PEMBERIAN IJIN KIPADA PENGURUS BP.3 SMP NEGERI I  
KERTOSONO UNTUK MENGETAHUI SUMBANGAN DARI PARA  
ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya khususnya SMP Negeri I Kertosono perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari negeri maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalamnya BP.3.

2. Bahwa Pengurus BP.3 SMP Negeri I Kertosono telah mengadakan pertemuan dengan Para Wali Murid Anggota BP.3 pada tanggal, 11 Oktober 1986 yang dihadiri oleh semua Anggota BP.3 beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana program pendidikan antara lain :

- a. Rehabilitasi Ruang Klas 3 (tiga) Lokal = Rp. 2.630.000,-
- b. Rehabilitasi Ruang Perpustakaan = Rp. 1.442.000,-
- c. Pemasangan langit-langit Ruang = Rp. 433.000,-
- d. Pengadaan :

- Bangku 1 (satu) lokal (20 stel)
- Meja Guru 10 (sepuluh) buah
- Bangku Perpustakaan 8 (delapan) buah
- Kursi ketrampilan jahit 40 (empat puluh) buah

Jumlah pengadaan barang = Rp. 2.500.000,-

Jumlah biaya keseluruhannya sebesar = Rp. 7.005.000,-  
Yang kesemuanya ini menelan biaya keseluruhannya diperkirakan sebesar Rp. 7.005.000,- (tujuh juta lima ribu rupiah).

✓ 3. Bahwa .....

3. Bawa berdasarkan point 1 dan 2 diatas kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin Kepada Pengurus BP.3 SMP Negeri I Kertosono untuk menghimpun sumbangan dari para wali murid sepanjang usaha tersebut betul-betul dinonfaktakan untuk kepentingan program pendidikan dengan Keputusan Bupati Kopala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perintah di Daerah.

2. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Edaran bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal, 9 Februari 1978 Nomor : PUOD/17/2/13 dan Nomor : 8306/MRK/1978 tentang, Pungutan masa sumbangan dari orang tua murid.

2. Surat Edaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa-Timur tanggal, 9 Juli 1984 Nomor : 973/I.04.22/B.18-'84 tentang, Pungutan pada sekolah negeri.

3. Surat Keterangan / Persetujuan dari Kantor Departemen Dikbud Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal, 10 Nopember 1986 Nomor : 2128/I.04.22/B.-1986.

#### N E M U T U S K A II

MEMUTAKAM : KEPUTUSAN BUPATI KOPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BP.3 SMP NEGERI I KERTOSONO UNTUK MENGHIMPUN SUMBAWAGAI DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1986.

#### Pasal 1.

Memberikan ijin Kepada BP.3 SMP Negeri I Kertosono untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya wali murid dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap.
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan.
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid baru atau kenaikan kelas dan sebagainya.
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid atau sudah menjadi murid sekolah yang bersangkutan.
- e. Sumbangan dilakukan dengan program yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkret dan berencana, perlu dipertanggung jawabkan kepada rapat Anggota BP.3 SMP Negeri I Kertosono.

f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar/les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP.3 dan tidak diperkenankan menggunakan personil sekolah atau murid.

Pasal 2.

Pengurus BP.3 SMP Negeri I Kertosono sebagaimana pada pasal 1 (satu) dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil pengumpulan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3.

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 (satu) wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalah gunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana pendidikan SMP Negeri I Kertosono.

Pasal 4.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk berhak mengawasi sewaktu-waktu dapat memeriksa usaha hasil penyelenggaraan serta penggunaan pengumpulan sumbangan.

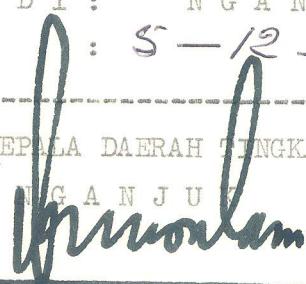
Pasal 5.

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K .  
TANGGAL : 5 - / 2 - 1986 .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

  
Drs. IBNU SALAM

NIP: 010015774.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada;  
Yth.1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa-Timur di Surabaya.

2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen  
Dikbud Propinsi Jawa-Timur di Su  
rabaya.

3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.

4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Dati  
II Nganjuk.

5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II  
Nganjuk.

6. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kabupaten  
Dati II Nganjuk.

7. Sdr. Kepala Kantor Departemen Dikbud.  
Kabupaten Dati II Nganjuk.

8. Sdr. Kepala Irwilkab Tingkat II Ngan  
juk.

9. Sdr. .....

- Yth.9. Sdr. Pembantu Bupati di Kertosono.  
10. Sdr. Camat Kertosono.  
11. Sdr. Kepala Sekolah SMP Negeri I -  
Kertosono.  
12. Sdr. Ketua BP.3 SMP Negeri Kertosono.  
13. Sdr. Kepala Bagian/Dinas Instansi-  
Setwilda Tingkat II Nganjuk.